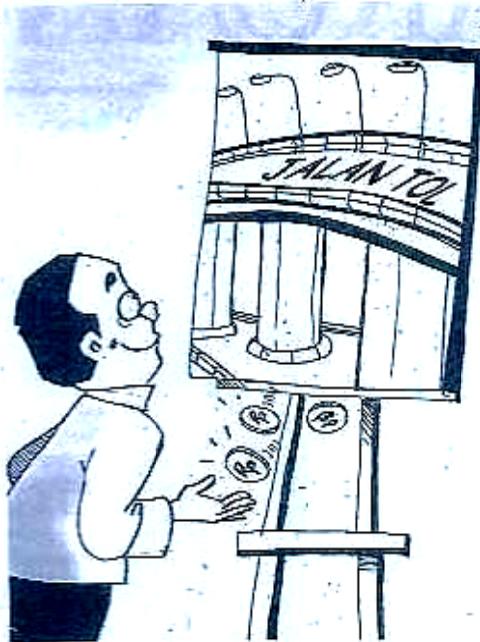


Proyek Tol Jadi Korban



Target pembangunan jalan tol Depok-Antasari baru akan selesai pada 2015. Alasannya, pembangunan saat ini sudah tidak mungkin

diteruskan agar rampung sesuai target awal 2014.

"Sejak awal memang proyek ini sudah bermasalah, dan akibatnya tersendat," kata sumber SP. Dia mengungkapkan, proyek ini sudah dijadwalkan sejak 2006, namun berlarut-larut sehingga baru bisa dimulai 2011.

"Perseteruan dua calon wali kota Depok dari dua parpol saat pilkada 2010, menjadi satu faktor utama mangkraknya pembangunan tol. Bagaimana mau membangun, kalau iklim tak kondusif?" katanya.

Akibat berlarut-larutnya perseteruan dua parpol, harga tanah di tempat yang akan dijadikan jalan tol sepanjang 12 kilometer dimanfaatkan para spekulan tanah, hingga naik tajam saat proyek berjalan lagi. Akibatnya, pemerintah pusat terpaksa menggelontorkan suntikan dana sebesar Rp 2 triliun untuk melanjutkan pembangunan itu.

Suntikan dana *land caping* ini diberikan setelah dana talangan pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 380 miliar yang tuntas pada 2011 lalu habis. Saat ini bantuan BLU yang tersisa tinggal Rp 20 miliar. "Habis untuk macam-macam. Bisa ditebaklah, dana itu untuk apa saja," katanya.

Selain itu, lanjutnya, agar memudahkan pembebasan lahan, pemerintah akan menggunakan UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan ini baru bisa berlaku setelah tahun 2014 untuk proyek yang dicanangkan sebelum 2012.

Dalam aturan ini, katanya, untuk membebaskan lahan akan menggunakan harga pasar yang berlaku secara umum. Selain itu, proses akan lebih terbuka di pengadilan atau menggunakan skema konsinyasi.

Karena keterlambatan proyek ini, tol Depok-Antasari mengalami lonjakan nilai investasi hingga dua kali lipat, yaitu sebesar Rp 4,767 triliun, dari sebelumnya Rp 2,515 triliun. Nilai investasi itu melampaui rencana bisnis empat tahun lalu. Untuk membangun sesi I, dibutuhkan dana Rp 3,073 triliun. Sementara untuk seksi II dari Sawangan-Bojonggede sepanjang 9,5 kilometer membutuhkan dana sekitar Rp 1,694 triliun.

Bahkan, pembangunan sesi I pun seharusnya sudah selesai pada 2009 lalu. Saat ini dari total 12 kilometer sesi I baru dibebaskan sekitar 20-30 persennya.

Di wilayah Depok, tol ini akan membebaskan 3.213 bidang tanah di delapan kelurahan. Perinciannya, 436 bidang di Kelurahan Fangkalan Jati, 98 di Gandul, 720 di Krukut, 402 di Grogol, 327 di Rangkapan Lama, 572 di Rangkapan Jaya Baru, 375 di Cipayung, dan 278 di Cipayung Jaya.

Adapun di Jakarta Selatan, pembebasan akan mencakup 690 bidang tanah di lima kelurahan. Perinciannya, 463 bidang tanah di Cilandak Barat, 38 di Cilandak Timur, 101 di Pondok Labu, 80 bidang tanah di Crganjur, dan 8 di Cipadak. [W-12]